

## TAJUK RENCANA

### Merealisasikan Vaksinasi Gotong Royong

**RENCANA** pemerintah membeli 426 juta vaksin Covid-19 Gotong Royong untuk diberikan secara gratis kepada pekerja swasta patut diapresiasi. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat program vaksinasi, sehingga diharapkan dalam waktu satu tahun sudah tuntas. Untuk menghindari over lapping dengan vaksinasi pemerintah, sudah tepat bila dibedakan jenis vaksinnya dari empat vaksin yang sudah ada, yakni Sinovac, AstraZeneca, Novavax dan Pfizer. Sedang vaksinasi Gotong Royong sudah dikonfirmasi menggunakan Sinopharm dan Moderna (KR 16/3).

Sejalan dengan namanya, vaksinasi Gotong Royong kepada penerima manfaat, yakni pekerja swasta ini akan diberikan secara gratis. Mekanismenya, Biofarma selaku BUMN akan membeli vaksin tersebut untuk kemudian menjualnya kepada korporasi. Selanjutnya korporasi akan memberikan secara cuma-cuma kepada pekerja.

Hemat kita, vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi mandiri, merupakan formulasi yang tepat untuk mengatasi ketersediaan ketersediaan vaksin. Dengan cara membeli vaksin melalui Biofarma diharapkan ketersediaan vaksin akan terpenuhi dan selanjutnya akan mempercepat vaksinasi sebagaimana diinstruksikan Presiden Jokowi.

Lantas, bagaimana bila korporasi tak mampu membeli vaksin Covid-19 Gotong Royong? Inilah yang perlu dipikirkan, agar program vaksinasi Gotong Royong tetap berjalan. Karena itu perlu dibuat regulasi terkait pengadaan vaksin Covid-19 Gotong Royong, berikut sistem pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasinya.

Pemerintah tentu telah memiliki database korporasi yang wajib menggratiskan vaksinasi kepada pekerjanya. Atau, bila memang ada korporasi yang secara finansial tidak mampu, bisa menerapkan skema subsidi silang agar program tetap berjalan.

Percepatan vaksinasi, hemat kita, wajib dilaksanakan guna menekan penyebaran Covid-19. Terlebih, belakangan muncul beraneka varian virus Korona yang juga harus kita antisipasi. Jangan sampai vaksinasi terlambat atau kalah cepat dengan mutasi virus Korona. Inilah saatnya untuk memobilisasi seluruh kekuatan yang ada untuk melawan Covid-19.

Selain melalui program vaksinasi, perlawanan secara reguler dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Untuk hal yang disebut terakhir ini mulai menampakkan hasilnya. Berdasar pantauan Satgas Covid-19, PPKM berbasis mikro berdampak signifikan terhadap penurunan angka kasus Covid-19 di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Karena itu vaksinasi dan penegakan prokes harus dilaksanakan secara berbarengan demi mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu mekanisme penerapan sanksi administratif bagi mereka yang melanggar prokes tetap perlu dipertahankan guna menimbulkan efek jera.

Kembali soal pengadaan vaksin Covid-19 Gotong Royong, kita sangat mendukung dan perlu segera direalisasikan. Pemerintah hendaknya sesegera mungkin membuat regulasi yang mengatur pengadaan, distribusi, serta pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong agar tepat sasaran dan terjangkau. Lebih dari itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan agar tidak ada penyimpangan di lapangan. □

## Lonceng Bahaya Bernama Perkawinan Anak

Fadmi Sustiwi

ADA yang terlewatkan banyak pihak, ketika Komnas Perempuan menyampaikannya catatan tahunannya, awal Maret silam. Saat Peringatan Hari Perempuan Internasional tersebut Komnas Perempuan mengungkap data yang disebutnya lonceng tanda bahaya. Dibanding tahun sebelumnya, data yang diperoleh dari Pengadilan Agama tahun 2020 mengungkap ada kenaikan 300% dispensasi perkawinan yang dikabulkan.

Komnas Perempuan mengungkap, dari data yang dihimpun Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag), dalam lima tahun terakhir dispensasi perkawinan melonjak tajam. Tahun 2016 ada 6.488 dispensasi yang dikabulkan; 2017 ada 11.819. Kemudian 2018 terdapat 12.504, pada 2019 ada 23.126 dan pada 2020 sebanyak 64.211. Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan kepada anak yang belum cukup usia menurut UU Perkawinan untuk menikah.

Angka yang merupakan fenomena gunung es. Besar kemungkinan, realita yang terjadi lebih besar lagi. Meski Anggota Komnas Perempuan Retty Ratnawati saat memaparkan catatan secara daring menyebutkan, tingginya angka dispensasi perkawinan ini kemungkinan karena kondisi pandemi, anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka serta kesulitan ekonomi keluarga. Kesulitan ekonomi kerap menjadi salah satu alasan untuk menikahkan anak.

**Stunting**  
Realita yang tidak bisa diabaikan. Karenanya upaya menunda atau menghentikan pernikahan anak harus selalu diingatkan. Tanpa ada penghentian, lonceng bahaya ini akan memiliki rentetan panjang. Kemungkinan tingginya angka stunting dan tidak tercapainya peningkatan sumberdaya manusia (SDM), adalah paling nyata.

Tidak mudah upaya membebaskan Indonesia dari perkawinan anak. Perlu jalan panjang yang berliku. Selain kehidupan dan pergaulan kian permisif, ma-

kerentanan kehidupan keluarga hingga dampak stunting dan kemiskinan berkekelanjutan. (Rakor KPAI, Desember, 2020).

**Perebutan Gizi**

Perkawinan anak berdampak buruk baik fisik, psikis maupun sosial ekonomis. Aktivis NGO, Zumrotin mengatakan, stunting disebabkan karena kekurangan gizi, ketiadaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan kemiskinan. Tetapi tidak dapat dimungkiri, stunting juga diakibatkan oleh perkawinan anak. Menurutnya, remaja hingga usia 21 tahun ia masih membutuhkan gizi maksimal. Tetapi karena sudah hamil, tubuhnya berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Apalagi jika ibu tidak paham memberi gizi pada anak. (voaindonesia, 9/3/2018).

Bangsa Indonesia sedang mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas, 2045. Perkawinan anak yang meningkat, bisa membuat berantakan semua rencana. Kini yang diperlukan adalah pencegahan dengan regulasi tegas seperti dilakukan Pemprov NTB yang Januari lalu mengesahkan Perda Pencegahan & Perkawinan Anak. Tentu juga diperketat aturan dispensasi. Di sisi lain, membangun kesadaran masyarakat dalam pencegahan menjadi 'PR' besar yang harus segera diselesaikan. Karena budaya memberi pengaruh kuat penyebab tingginya angka perkawinan anak. □

*\*) Fadmi Sustiwi, jurnalis kesehatan, Wakil Ketua Departemen Perempuan & Anak ICMI Yogyakarta*



KR-JOKO SANTOSO

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Sinergi Wujudkan Pendidikan Multikultural

Abdul Latif Muslich

TIPOLOGI masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural, sehingga bangsa ini membutuhkan pendidikan yang mampu mengakomodasi beragam kebudayaan. Oleh karenanya, kehadiran pendidikan multikultural sangatlah penting di negara *bhinneka* ini. Pendidikan multikultural merupakan bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan konsep berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, seperti keragaman teknis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan umur, dan ras. Dan yang terpenting bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik agar berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis (Mania, 2010).

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Tentang Seragam Sekolah dan Atribut Agama bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri sudah tepat dan patut kita dukung. SKB 3 Menteri ini juga sudah selaras dengan pendidikan multikultural. Dan kunci sukses dalam mewujudkan pendidikan multikultural harus dengan langkah sinergi di antara pihak-pihak terkait.

**Langkah Strategis**

Kita juga tahu bahwa pendidikan multikultural ini sangat strategis dalam mengikis intoleransi, serta fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang kerap muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun ada beberapa karakteristik dan hal-hal prinsip yang patut kita pahami terkait dengan penerapan pendidikan multikultural ini. Pertama, belajar hidup dalam perbedaan. Dalam hal ini diperlukan pilar strategis di antaranya belajar saling menghargai akan perbedaan, sehingga akan terbangun relasi antara personal dan intra-personal. Kondisi di sekolah umum sangat beragam suku, agama, dan budaya dituntut untuk seluruh elemen warga sekolah be-

lajar saling menghargai dan menghormati, termasuk dalam kegiatan persekolahan ataupun pembelajaran.

Kedua, membangun *mutual trust* (saling percaya), *mutual understanding* (saling pengertian), dan *mutual respect* (saling menghargai). Tiga hal ini sebagai konsekuensi logis akan kemajemukan dan kehegemonikan, maka diperlukan pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis, serta kesetaraan hak.

Ketiga, terbuka dalam berpikir. Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berpikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang berbeda. Kemudian direspons dengan pikiran terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Itu artinya, sekolah wajib memberikan wadah seluas-luasnya bagi semua suku, agama, dan budaya dengan asas inklusifnya (terbuka). Ini juga selaras dengan apa yang disebutkan dengan merdeka belajar.

**Rekonsiliasi Nirkekerasan**  
Keempat, apresiasi dan interdependensi. Karakteristik ini mengedepankan tatanan sosial yang peduli, di mana semua anggota masyarakat dapat saling mewujudkan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi, dan keterkaitan sosial yang rekat. Karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa *survive* tanpa ikatan sosial yang dinamis. Kelima, resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dalam berbagai hal harus dihindari, dan pendidikan harus memfungsikan diri sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Adapun resolusi konflik belum

cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya pendamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan.

Pendidikan yang kini dibutuhkan Bangsa Indonesia yang multikultural adalah pendidikan yang memberikan peran sebagai media transformasi budaya (dan transformasi pengetahuan. Mengingat selama ini pendidikan di Indonesia lebih cenderung berorientasi hanya sebagai media transformasi pengetahuan saja.

Melalui pendidikan multikultural, peserta didik yang datang dari berbagai golongan penduduk dididik untuk saling mengenal agama, budaya, cara hidup, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Dengan mengajarkan pendidikan multikultural, para peserta didik sedini mungkin dibimbing memahami makna *Bhinneka Tunggal Ika*. Serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. □

*\*) Abdul Latif Muslich, Guru di MTs Negeri Salatiga*

## Pojok KR

Sebelum tatap muka, guru harus sudah divaksin.

-- **Jangan berspekulasi terhadap kesehatan siswa.**

\*\*\*  
Harga cabai rawit tembus Rp 120 ribu/kg

-- **Mudah-mudahan tak ada permainan harga.**

\*\*\*  
Wagub DIY minta jaga kelancaran vaksinasi massal.

-- **Yang belum divaksin harap bersabar.**

*Beraksi*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Pemimpin: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo S.Sos.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musbahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrky2@yahoo.com](mailto:iklankrky2@yahoo.com), [iklankrky13@gmail.com](mailto:iklankrky13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d SI, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%